

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merantau atau migrasi penduduk di Indonesia sudah terjadi sejak jaman Kolonial Belanda. Migrasi ini terjadi baik secara spontan maupun diatur pemerintah. Migrasi spontan dilakukan beberapa kelompok etnis tertentu seperti Bawean, Bugis, Banjar dan Minangkabau. Migrasi yang diatur pemerintah terlihat pada program transmigrasi. Pada Jaman kolonial Belanda, pemerintah mengatur migrasi ini di bawah program rekrutmen kuli kontrak yang mengirim Orang Jawa ke daerah-daerah perkebunan yang baru di buka atau keluar negeri, dan pada waktu Pemerintahan Jepang migrasi tenaga kerja dikenal sebagai romusha. Setelah kemerdekaan, migrasi terus berlangsung baik mengikuti pola spontan maupun yang diatur pemerintah itu (Aswatini Raharto, 2004).

Dalam interaksi antar berbagai kelompok masyarakat, kehadiran kelompok pendatang/migran, bisa melahirkan konflik di samping integrasi sosial. Kasus-kasus konflik antar kelompok etnis pendatang dengan penduduk setempat jelas terlihat pada konflik Timor-timor (1995), Situbondo (1996), Tasikmalaya, Rengasdengklok, Sanggauledo, Karawang-Bekasi, Kupang (1997), Sambas (1999), Mataram (2000) (Riza Situbondo, 2007). Akibatnya, Desa dan Anak

Konflik, di samping dalam bentuk antara pendatang dengan penduduk asli, juga bisa terjadi antar sesama pendatang yang berbeda etnis, maupun antara penduduk dengan pemerintahan setempat (Mita Noveria, 2003). Contoh konflik dalam bentuk yang terakhir ini adalah pada pengusiran TKI dari Malaysia. Pada bulan Februari 2004, misalnya, lebih dari 400 ribu perantau Indonesia yang mengadu nasib sebagai tenaga kerja di Malaysia dan dianggap sebagai TKI ilegal, diminta segera meninggalkan negeri idaman itu kalau tidak mau dikejar, ditangkap, dihukum cambuk dan diusir (Jawa Pos, 1 Februari 2005).

Dalam kasus pengusiran perantau ilegal Indonesia oleh pemerintah Malaysia itu ada banyak kisah dibaliknya, antara lain cerita tentang kritik terhadap pemerintah maupun ulama Malaysia yang tidak berpihak kepada para buruh migran yang notabene adalah muslim juga, sampai soal pembayaran upah yang disandera oleh beberapa majikan (Deliar Noer, Republika, 22 Maret 2005).

Pengusiran adalah salah satu manifestasi konflik yang memuncak. Ketika pengusiran terjadi berarti berbagai faktor-faktor integratif yang memungkinkan hubungan antar kelompok berjalan baik tidak lagi fungsional. Ada banyak kesamaan atau faktor-faktor integratif antara para perantau Indonesia dengan penduduk Melayu setempat dimana mereka merantau: satu rumpun bangsa, satu bahasa, satu warna kulit. Tetapi berbagai kesamaan itu tidak mampu mengintegrasikan mereka di

negeri rantau semata karena ketidaklengkapan administratif alias dianggap sebagai TKI ilegal.

Dalam interaksi antar etnis pendatang dengan penduduk setempat, di samping konflik, juga ditemukan adanya integrasi sosial. Hal ini antara lain terlihat pada para perantau etnis Jawa, Batak dan Minangkabau (Mahli, 2002). Pada kasus pengusiran TKI dari Malaysia ternyata hal yang tidak banyak diungkap adalah adanya kelompok etnis tertentu yang relatif tetap bisa bertahan di negeri rantau dan seakan tidak terusik oleh program pengusiran itu. Di antara mereka yang disebut terakhir ini adalah para TKI yang berasal dari kelompok etnis Minangkabau. Dengan kata lain, orang Minangkabau bisa melakukan integrasi sosial dengan baik di negeri rantau.

Secara sosiologis, merantau bagi para orang Minang memang merupakan sebuah keniscayaan. Dalam hal ini Syafri Sairin melihat tiga ciri yang sangat kuat pada orang Minangkabau: pertama, sistem kekerabatan matrilineal dimana keanggotaan keluarga ditentukan oleh garis keturunan ibu. Kedua, sebagai kelanjutan dari sistem matrilineal itu, di *rumah gadang*, laki-laki tidak mempunyai hak. Tidak ada kamar khusus bagi mereka. Kamar hanya untuk anak perempuan (dengan suaminya). Ketiga, orang Minang harus beragama Islam karena dasar falsafat Minangkabau adalah *adat bersandi syara, 'syara' bersandi kitabullah*. Akibatnya, sejak kecil anak laki-laki Minangkabau sudah negeri

'merantau' dalam bentuk setiap malam belajar mengaji dan tidur di masjid, tidak di rumah sendiri (KR, 15 Jan 2005, hlm 15).

Pada sisi lain, dewasa ini muncul banyak kritik terhadap orang Minangkabau, khususnya dalam hubungan antara Islam dan perilaku sehari-hari mereka sebagai seorang muslim. Ahmad Syafii Maarif, misalnya mengatakan kemerosotan etika dan tatakrama semakin dirasakan di lingkungan masyarakat Minangkabau. "*Adat basandi syara' dan syara' basandi kitabullah* semakin mengawang jauh di langit, tidak lagi membumi," tulis Syafii Maarif. (Republika, 21 Juni 2005).

Namun demikian, walau dengan berbagai catatan, bila dibandingkan dengan etnis lain yang berkonflik dengan masyarakat negeri tempat mereka berdomisili sebagaimana tersebut di atas, adalah menarik untuk melihat realitas integrasi yang baik antara orang Minang yang tetap membawa identitas religio-etnis mereka di negeri rantau.

B. Perumusan Masalah

Tema penelitian ini adalah integrasi antar kelompok dalam masyarakat. Kelompok yang dimaksud adalah kumpulan orang yang menyepakati suatu masalah dan bergerak bersama dalam menyikapi masalah tersebut, memiliki harapan bersama dan memiliki suatu rasa senasib sepenanggungan. Ada banyak macam kelompok: persahabatan informal, kelompok-kelompok etnis, masyarakat, kelompok antar masyarakat. Hubungan antar kelompok adalah bentuk-bentuk hubungan

yang dikembangkan di antara dua kelompok (Borgotta, 1962). Kelompok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kelompok etnis yaitu kelompok yang terbentuk oleh identifikasi diri atas kesamaan daerah asal yaitu sebuah nagari di Minangkabau yang bernama Silit Air. Secara administratif, dewasa ini Silit Air adalah sebuah wilayah setingkat kecamatan yang berada di Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat.

Sebagaimana penduduk nagari yang lain di Minangkabau, orang Silit Air suka merantau. Sampai April 2003, dari sekitar 100 ribu jiwa penduduk Silit Air diketahui sekitar 90.000 orang berada di luar Silit Air, tersebar di 95 kota di tanah air dan luar negeri (Suara Pembaruan.Com/ news/ 2003/05/11).

Beberapa karakteristik membedakan perantau asal Silit Air dengan perantau asal nagari lain di Minangkabau maupun wilayah lain di Indonesia. Karakteristik itu antara lain adalah: *pertama*, adanya organisasi kedaerahan yang kuat dan aktif yaitu Silit Air Sepakat (SAS). SAS dewasa ini memiliki 80 cabang di berbagai penjuru, 43 gedung serbaguna yang antara lain berlokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan, dengan nilai aset sekitar Rp. 25 Miliar. Cabang SAS di luar Negeri antara lain ada di Australia, Malaysia, dan Brunei Darussalam (Suara Pembaruan.Com/ news/2003/ 05/11). *Kedua*, sebagai sebuah organisasi SAS bergerak aktif dalam beberapa aktivitas rutin. Untuk SAS Jogjakarta, misalnya, aktivitas rutin itu berlangsung dua kali sebulan. Pertemuan pertama berisi pengajian, keagamaan dan pertemuan kedua diisi dengan

pembicaraan tentang saling bantu permodalan (Wawancara dengan Nasrullah, seorang aktivis SAS, Juni 2004)

Ruang lingkup penelitian ini adalah integrasi sosial antar kelompok masyarakat Sulit Air dengan salah satu masyarakat dimana mereka sekarang berdomisili yaitu Yogyakarta. Karena berbagai keterbatasan kemampuan maupun kesempatan, pada penelitian ini Yogyakarta dipilih lebih sebagai sebuah penelitian awal.

Karena integrasi tidak bisa terjadi dengan sendirinya, artinya melalui suatu proses dan berkaitan dengan berbagai faktor, maka usaha memahami integrasi harus melihat fase-fase integrasi itu dan hal-hal yang berhubungan dengannya yang telah berkembang dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dimaksud adalah dalam aspek pendidikan, sosial ekonomi, religiusitas dan pola pembinaan keagamaan yang dilaksanakan.

Dengan latar belakang seperti itu, penelitian ini akan meneliti mengapa *integrasi sosial berjalan baik antara masyarakat Sulit Air dengan masyarakat tempat mereka tinggal di Yogyakarta.*

Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat etnisitas dan religiusitas orang Sulit Air di Sulit Air dan di Jogja?

2. Bagaimana tingkat integrasi sosial orang Sulit Air di Kecamatan Sulit

3. Bagaimana hubungan antara etnisitas dan religiusitas dengan integrasi sosial pada masyarakat Sulit Air di Kecamatan Sulit Air dan